



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2020/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI) PERWAKILAN PROVINSI D.I.
YOGYAKARTA
SUB UNIT KERJA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI) PERWAKILAN PROVINSI D.I.
YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TEGUH SRIHASTO**
2. Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
3. NHK : **431784**

II. DATA HARTA

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| A. TANAH DAN BANGUNAN | Rp. | 1.269.750.000 |
| 1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/360 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , WARISAN Rp. 675.000.000 | | |
| 2. Tanah Seluas 82 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 251.000.000 | | |
| 3. Tanah Seluas 125 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 343.750.000 | | |
| B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN | Rp. | 227.000.000 |
| 1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000 | | |
| 2. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000 | | |
| 3. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000 | | |
| 4. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000 | | |
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 42.000.000 |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | --- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 24.036.948 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | --- |



| | | |
|-----------------------------------|-----|---------------|
| Sub Total | Rp. | 1.562.786.948 |
| III. HUTANG | Rp. | 70.000.000 |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 1.492.786.948 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **2 Juli 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.